



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) DINAS SOSIAL

TAHUN 2026

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Sekretariat :
Jl. M. Hatta Kuala Pembuang
<https://dinsos.seruyankab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**RENCANA AKSI KINERJA (RAK)
TAHUN 2026**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) dimana setiap satuan kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok fungsi serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat berdasarkan Rencana Aksi Kinerja (RAK) yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial kabupaten Seruyan Tahun 2026 memuat target kinerja untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial kabupaten Seruyan.

Rencana Aksi Kinerja (RAK) ini disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2026 yang memuat pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Sosial kabupaten Seruyan pada tahun 2026 yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk pencapaian dari target kinerja organisasi yang selanjutnya dilaporkan atas capaian tersebut kedalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) untuk menilai keberhasilan dari organisasi.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari beberapa pihak untuk penyempurnaan penyusunan rencana aksi kinerja yang akan datang. Kami berharap mudah – mudahan RAK ini dapat memberikan kontribusi yang positif terutama dalam mendorong kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dalam upaya membangun pemerintah Kabupaten Seruyan yang lebih baik.



Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini, semoga kita semua dapat bekerjasama dalam melaksanakan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 tersebut untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2026 dengan baik.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Sosial,



HALIDAH, S.Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2.1 Tugas dan Fungsi.....	1
1.2.2 Struktur Organisasi.....	2
1.2.3 Dukungan Sumber Daya	3
1.2.3.1 Dukungan Sumber Daya manusia.....	3
1.2.3.2 Dukungan Sumber Daya Sarana / Prasarana.....	5
1.2.4 Dukungan Anggaran	6
1.2.5 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	6
1.2.6 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	7
1.2.7 Isu Strategis	9
1.3 Dasar Hukum	10
1.4 Maksud dan Tujuan	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II RENCANA AKSI KINERJA	16
2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra	16
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.3 Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon II	24
2.4 Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026	26
BAB III PENUTUP.....	34



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Existing Dinas Sosial Per 1 Januari 2026.....	4
Tabel 1.2	Aset Dinas Sosial.....	5
Tabel 1.3	Pagu Anggaran Belanja Dinas Sosial Tahun 2026	6
Tabel 1.4	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025	6
Tabel 2.1	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Dinas Sosial	16
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II Dinas Sosial Tahun 2026	18
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja (PK) Esselon III Dinas Sosial Tahun 2026	19
Tabel 2.5	Penjenjangan Kinerja (cascading) Tahun 2026	22
Tabel 2.6	Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Tahun 2026	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	2
Gambar 1.2 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS)	8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki kewajiban untuk melaksanakan komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi .

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, Dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Kinerja (RAK) tahun 2026 sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026. Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2026 ini memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2026.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, dan diatur tata kelola organisasinya berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan unsur



pelaksana urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disektor Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- b. Pengumpulan Sumbangan dalam daerah;
- c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- d. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
- e. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- f. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- g. Pemeliharaan Anak-anak terlantar;
- h. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah;
- i. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- j. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana; dan
- k. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

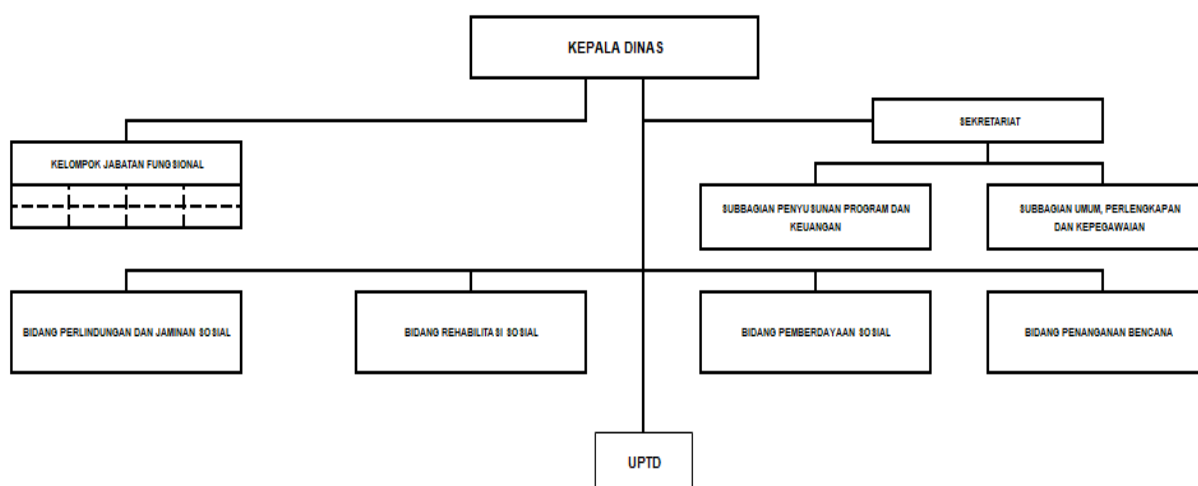
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.



- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Penanganan Bencana;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- i. UPTD.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan



1.2.3 DUKUNGAN SUMBER DAYA

1.2.3.1 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 (empat) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 16 (enam belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

Menurut eselon terdiri dari :

- Eselon IV : 2 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon II : 1 orang



Menurut golongan terdiri dari :

Golongan IV : 6 orang

Golongan III : 14 orang

Golongan II : 2 orang

Menurut pendidikan terdiri dari :

SLTA : 14 orang

D.III : 4 orang

S-1 : 21 orang

S-2 : 4 orang

Menurut jenis kelamin terdiri dari :

Laki-laki : 18 orang

Perempuan : 25 orang

Dibidang sumber daya manusia, jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan per Januari 2026 sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Daftar Existing Dinas Sosial Per 1 Januari 2026

NO	NAMA JABATAN	STATUS ASN			KELAS JABATAN
		PNS	PPPK	PPPK PW	
1	KEPALA DINAS	1	-	-	14
2	PEKERJA SOSIAL MADYA	-	-	-	11
3	PEKERJA SOSIAL MUDA	4	-	-	10
4	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	-	-	-	8
5	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL	-	-	-	6
6	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA	1	-	-	5
7	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	-	-	-	9
8	PERENCANA MADYA	-	-	-	11
9	PERENCANA MUDA	-	-	-	10
10	PERENCANA PERTAMA	-	-	-	8
11	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	-	-	-	7
12	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	-	-	-	6
13	PRANATA KOMPUTER TTERAMPIL	1	-	-	7
14	SEKRETARIS	1	-	-	13
15	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-	-	9
16	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	-	-	7
17	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
18	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	-	5
19	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2	
20	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
21	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN	1	-	-	9
23	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	2	-	7
24	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
25	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	-	5
26	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
27	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
28	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2	



29	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	-	-	11
30	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	-	-	7
31	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	-	-	6
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	-	-	5
33	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
34	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
35	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2	
36	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	-	-	11
37	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	-	7
38	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
39	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	-	5
40	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
41	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
42	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	3	
43	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	-	-	11
44	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	-	7
45	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
46	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	-	5
47	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
48	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
49	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
50	KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA	1	-	-	11
51	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	-	7
52	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
53	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	-	-	5
54	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2	
55	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
56	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
JUMLAH		22	4	16	

1.2.3.2 Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Sosial pada tahun 2026 berupa harta / aset yang dikelola sebesar Rp 13.282.264.430 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Aset Dinas Sosial

No.	Klasifikasi	Nilai Aset Tetap
1	Tanah	1.287.994.500
2	Peralatan dan Mesin	2.953.012.580
3	Gedung dan Bangunan	5.867.889.250
4	Jalan, Irigasi dan Bangunan	3.173.368.100
Jumlah		13.282.264.430

Secara rinci barang sarana prasarana milik Dinas Sosial yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial antara lain 4 (empat) bidang tanah Taman Makam Pahlawan, 1 (satu) bidang tanah peruntukan Sekolah Rakyat (SR), Kendaraan operasional Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat (minibus) kendaraan dinas jabatan, 2 (dua) unit kendaraan roda empat Hilux, 1 (satu) unit DUMLAP, 1 (satu) unit truk bak



terbuka, 2 (dua) unit kendaraan operasional Reaksi Cepat dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua. Kendaraan operasional Dinas Sosial sebagian besar didapat dari pengadaan tahun 2010, sehingga biaya pemeliharaan semakin besar tiap tahunnya.

Kebutuhan ruangan kantor umum belum tersedia secara lengkap yakni ruang rapat, ruang mushola, ruang menyusui dan ruang arsip. Untuk ketersediaan ruangan kerja berbanding dengan rasio pegawai masih belum mencukupi. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, CCTV dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 2. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Terutama untuk personal computer, laptop dan ruang kerja kantor.

1.2.4 DUKUNGAN ANGGARAN

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial kabupaten Seruyan berasal dari APBD Daerah kabupaten Seruyan. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2026 disusun menurut Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar bidang Sosial. Rekapitulasi Pagu Anggaran Belanja Dinas Sosial pada Tahun 2026 sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 1.3
Pagu Anggaran Belanja Dinas Sosial Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1.	DINAS SOSIAL	Rp. 5.783.347.586

1.2.5 POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH	SERTIKAT KOMPETENSI / AKREDITASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Pekerja Sosial (Profesional)	5	1	Data Peksos Dinsos Tahun 2025	1 Orang Peksos Murni, 4 orang Peksos Penyetaraan (Sekretariat Dinas Sosial)
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	7	3	Data PSM Kab. Seruyan	Dayasos Dinsos
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	3	SK Kemensos tt TKSK	Dayasos Dinsos
4	Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas)	3	3	Data Pensosmas Dinsos Tahun 2025	Dayasos Dinsos
5	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	5	5	Data SDM Kesejahteraan Sosial 2025	Dayasos Dinsos
6	Pendamping Rehabilitasi Sosial	1	1	Data SDM Kesejahteraan Sosial 2025	Dayasos Dinsos
7	Relawan Sosial	2	2	Data SDM Kesejahteraan Sosial 2025	Dayasos Dinsos
8	Pelopor Perdamaian	3	0	Data SDM Kesejahteraan Sosial 2025	Penanganan Bencana
9	Taruna siaga Bencana (TAGANA)	65	65	SK Tagana	Penanganan Bencana
10	Kampung Siaga Bencana (KSB)	2	0	SK KSB	Penanganan Bencana
11	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10	4	Daftar Direktori LKS LKSA	Dayasos Dinsos
12	Karang taruna	59	0	Data BNBA Karang Taruna Kab. Seruyan	Dayasos Dinsos
13	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	0	SK Bupati tentang LK3	Dayasos Dinsos
14	Keluarga pioner	5	0	Data keluarga pioneer	Dayasos Dinsos
15	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSMBM)	0	0	n/a	Dayasos Dinsos
16	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	0	0	n/a	Dayasos Dinsos
17	Dunia Usaha	4	0	Data Dunia Usaha Penyelenggara Kessos / CSR	Dayasos Dinsos
JUMLAH PSKS		182	87		

1.2.6 PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Kelompok sasaran layanan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

UU Kesejahteraan Sosial mendefinisikan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,



sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial ini mencakup berbagai bentuk bantuan, baik materiil maupun non-materiil, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PPKS.

Kelompok sasaran layanan Renstra Dinas Sosial 12 PAS dapat dikategorikan sebagai berikut:

Gambar 1.2
12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS)



Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdata dan tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025

NO	12 KELOMPOK PEMERLU ATENSI SOSIAL (12 PAS)	TERDATA	TERTANGANI	BIDANG TEKNIS	
1	ANAK - ANAK RENTAN	1. Balita terlantar	0	0	Rehabilitasi Sosial
		2. Anak terlantar	15	15	Rehabilitasi Sosial
		3. Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	17	17	Rehabilitasi Sosial
		4. Anak difable,	44	44	Rehabilitasi Sosial
		5. Anak korban tindak kekerasan,	13	13	Rehabilitasi Sosial
		6. Anak jalanan,	0	0	Rehabilitasi Sosial
		7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	23	23	Rehabilitasi Sosial
		8. Anak Yatim Piatu (YAPI)	25	25	Rehabilitasi Sosial
2	DIFABEL	320	156	Rehabilitasi Sosial	
3	LANSIA TERLANTAR	1694	220	Rehabilitasi Sosial	
4	BERPENDAPATAN RENDAH	10. Lanjut Usia Terlantar / Miskin	2	2	Rehabilitasi Sosial
		11. Gelandangan / OT	1	1	Rehabilitasi Sosial
		12. Pengemis	3	3	Rehabilitasi Sosial
5	KORBAN BENCANA	13. Pemulung	1235	1235	Penanganan Bencana
		14. Bencana Alam	156	156	Penanganan Bencana
6	AFIRMASIS KHUSUS	tdk ada	tdk ada	Pemberdayaan Sosial	
7	WARGA BINAAN / Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	15. Bencana Sosial	0	0	Rehabilitasi Sosial
		16. Kelompok Adat Terpencil (KAT)	0	0	Rehabilitasi Sosial
8	KORBAN KEKERASAN	0	0	Rehabilitasi Sosial	



		20. Korban trafficking	0	0	Rehabilitasi Sosial
		21. Pekerja migran bermasalah sosial	2	2	Rehabilitasi Sosial
9	KORBAN NAPZA DAN HIV/AIDS	22. Korban penyalahgunaan NAPZA	0	0	Rehabilitasi Sosial
		23. Penderita HIV/AIDS	0	0	Rehabilitasi Sosial
10	BERMASALAH SOSIAL	24. Kelompok minoritas	0	0	Rehabilitasi Sosial
		25. Keluarga bermasalah sosial psikologis	3	3	Resos dan Dayasos
11	PEREMPUAN RENTAN	26. Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE)	20	20	Rehabilitasi Sosial
		27. Tuna Susila	0	0	Rehabilitasi Sosial
12	FAKIR MISKIN	28. Fakir Miskin / rentan (penerima bansos)	51.729	51.729	Perlindungan dan Jaminan Sosial
JUMLAH			55.302	53.664	

1.2.7 ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis Dinas Sosial dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

Peningkatan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal sebagai antisipasi Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan

2. Optimalisasi Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial

Adapun yang akan dilakukan berupa penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial dengan memberikan pelayanan dasar kesehatan dan sosial. Penyempurnaan perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pelaksanaan Program Kegiatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial;

3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Perlunya Peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Sosial dalam penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bentuk dukungan keterlibatan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial. Keberadaan pendamping kesejahteraan sosial menjadi salah satu aspek terpenting untuk memastikan bahwa program kesejahteraan sosial sudah terlaksana dengan baik. Dinas Sosial memiliki beberapa pendamping seperti pendamping rehabilitasi sosial,



pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun dalam pelaksanaannya pendampingan yang dilakukan tidak optimal serta belum adanya mekanisme pendampingan dan monitoring lanjutan yang valid dan komprehensif.

4. Peningkatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIK-NG berupa pengelolaan data (verifikasi, validasi dan pemutakhiran DTKS), pengelolaan informasi kesejahteraan sosial, fasilitasi bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga, sosialisasi bantuan sosial pengembangan ekonomi, peningkatan keaktifan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan penanganan sistem layanan terpadu penanganan kemiskinan (SLRT).

5. Penurunan Angka Kemiskinan

Tugas Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah yang sasaran strategisnya mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seruyan, dimana target penurunan Tingkat Kemiskinan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Periode Tahun 2025-2029 sebesar 6,36 dari baseline kondisi awal tahun 2024 sebesar 7,08.

1.3 DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di



- Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
 23. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
 24. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 Nomor 21).
 25. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2 / 304 / 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat daerah tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Aksi Kinerja (RAK) merupakan suatu rumusan yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung



yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*Outcome*). Sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan pada tahun 2026, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi tahunan dan berkala secara periodic (bulanan / triwulan / semester).

Secara umum maksud dan tujuan dibuatnya Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tahun 2026 ini adalah :

1. Tolak ukur menilai keselarasan antara tujuan (*goal*) dan cara (*means*)
2. Validitas data capaian kinerja
3. Monitoring dan evaluasi berkala
4. Mitigasi progres capaian kinerja
5. Bahan evaluasi pimpinan berupa arahan dan kebijakan
6. Dasar perencanaan berikutnya

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang, Gambaran Umum Organisasi, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II RENCANA AKSI KINERJA

Pada bagian ini dikemukakan Tujuan dan Sasaran Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon II dan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

BAB III PENUTUP

Pada bagian ini mengemukakan kesimpulan penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.



BAB II

RENCANA AKSI KINERJA (RAK)

2.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) Tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Sosial untuk kurun waktu periode renstra.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025-2029 yaitu didasarkan pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 serta mempedomani Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang kemudian dirumuskan sebagai berikut :



**“Terwujudnya Transformasi
Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang
Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, Dan
Amanah Untuk Semua”**

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029, antara lain:

MISI I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.

MISI II : Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif

MISI III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik

MISI IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana

MISI V : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Seruyan, Dinas Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke I Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Untuk pengukuran pencapaian Misi I RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menetapkan indikator kabupaten, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Dinas Sosial

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET RPJMD					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul	Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan	Menurunnya kemiskinan (Sasaran ke-5)	Tingkat Kemiskinan	6,36%	6,20%	5,50%	5,10%	5,06%	5,01%
				Nilai SAKIP	71	73	74	75	76	77



Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goal*) yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi tersebut dan *ultimate outcome* Sektor Pengentasan Kemiskinan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Seruyan, serta permasalahan dan isu-isu strategis pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Seruyan.

Berikut perumusan tujuan (*intermediate outcome*) dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 dengan relevansi terhadap Sasaran RPJMD :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial

NSPK SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						K E T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	95%	90%	85%	80%	75%	75%	
		Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial	58 (CC)	60 (B)	62 (B)	64 (B)	66 (BB)	66 (BB)	

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dari Rencana Strategis Dinas Sosial untuk mendukung pencapaian sasaran Menurunnya Kemiskinan di Kabupaten Seruyan dengan fokus pada penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan, maka di susunlah penjenjangan kinerja (*cascading*) Dinas Sosial.

Fungsi utama *cascading* (penjenjangan) kinerja adalah menurunkan sasaran strategis pimpinan ke level yang lebih rendah (unit/pegawai) guna memastikan keselarasan, fokus kegiatan, dan akuntabilitas. Proses ini membangun hubungan sebab-akibat (*logika if-then*) dari tujuan strategis ke aktivitas operasional, sehingga memudahkan pengukuran kinerja dan optimalisasi sumber daya. Penjenjangan kinerja dilakukan melalui pohon kinerja (*pokin*) yang menjabarkan hasil ke faktor kunci keberhasilan (*critical*



success factor) hingga ke indikator kinerja individu.

Dari cascading (penjenjangan) kinerja Dinas Sosial maka ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2026 antara Kepala Dinas Sosial dengan Bupati Kabupaten Seruyan. Untuk selanjutnya Perjanjian Kinerja tersebut diturunkan dalam perjanjian kinerja internal berjenjang dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sampai dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk tahun 2026, sesuai tabel.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II Dinas Sosial Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	IKU YANG MENJADI PK	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	<p>Definisi Operasional : Perhitungan jumlah PPKS yang telah menerima pelayanan sosial, dibagi dengan total PPKS yang teridentifikasi, kemudian dikalikan seratus persen, yang menunjukkan efektivitas intervensi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapat penanganan}}{\text{Jumlah PPKS yang terdata di Kabupaten Seruyan}} \times 100\%$	ESS. II
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	60 (B)	<p>Definisi Operasional : Hasil Penilaian akuntabilitas instansi Pemerintah, yang merupakan integrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas</p> <p>Formulasi Perhitungan: Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP</p>	ESS. II

Definisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial yang dilaksanakan mencakup berbagai bentuk bantuan, baik materiil maupun non-materiil, untuk



meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PPKS.

Perjanjian Kinerja ke-1 Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani, ditetapkan target 100% (seratus persen) pada tahun 2026. Diharapkan kelompok sasaran 12 PAS dapat terdata dan tertangani secara optimal selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan jumlah PPKS bisa menurun secara signifikan sesuai dengan Tujuan Renstra Dinas Sosial.

Perjanjian Kinerja ke-2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial, ditetapkan target meningkat secara bertahap dalam setiap tahun dengan target Nilai 60 di tahun 2026. Di harapkan peningkatan kualitas pelayanan publik pelayanan sosial dan adminitrasi baik dari segi SDM, anggaran dan sarana / prasarana dapat mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Untuk Tujuan Dinas Sosial Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akan masuk ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun kelima / tahun terakhir (2029).

Penjenjangan sasaran strategis pimpinan ke level yang lebih rendah (unit/pegawai) guna memastikan keselarasan, fokus kegiatan dan memudahkan pengukuran kinerja dan optimalisasi sumber daya. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan Administrator untuk tahun 2026, sesuai tabel :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja (PK) Esselon III Dinas Sosial Tahun 2026

NO	SASARAN	IKK YANG MENJADI PK	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB (ESS.III)
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	%	100	Sekretaris
2	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial
3	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial



4	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	%	0	Kabid Pemberdayaan Sosial
5	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
6	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
7	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
8	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
9	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
10	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
11	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
12	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	%	100	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
13	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	70	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
14	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	1,5	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
15	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	Kabid Penanganan Bencana
16	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100	Kabid Penanganan Bencana
17	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	Kabid Penanganan Bencana
18	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial



19	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	orang	46	Kabid Rehabilitasi Sosial
20	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	16	Kabid Rehabilitasi Sosial
21	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	12	Kabid Rehabilitasi Sosial
22	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	orang	4	Kabid Rehabilitasi Sosial
23	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota (SPM)	orang	200	Kabid Rehabilitasi Sosial

Penjenjangan kinerja selanjutnya hingga ke indikator kinerja individu menyesuaikan dengan cascading dengan pengaturan perjanjian kinerja internal, sesuai tabel berikut :



Tabel 2.5
Penjenjangan Kinerja (cascading) Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	SASARAN (OUTCOME)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SASARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN
Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	90	
	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial		1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100%	94.405.000
					2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100%	
					3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan	0%	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	100%	94.405.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2	15.570.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6	62.954.000
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	2	4.315.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	20	11.566.000
		Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase warga Negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	3.823.000
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	100%	3.823.000
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	3	3.823.000



Rencana Aksi Kinerja (RAK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

			dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten /Kota	Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial		1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	165.878.000
					2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
					3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
					4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
					5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	161.344.000
			Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	70	22.528.000
			Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10	8.786.000
			Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	42.300.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	29.174.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3	13.286.000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8	32.023.000
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2	260.000
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	2.739.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	1.200.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	420.000



Rencana Aksi Kinerja (RAK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

			Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	8.628.000
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	3	-
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	4.534.000
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3	4.534.000
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		1. Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	142.888.000
					2. Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	100%	
					3. Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	70%	
					4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1,5%	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	100%	142.888.000
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	39.500	-
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.714	55.196.000
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	12.800.000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	4	74.892.000
		Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Program Penanganan Bencana		1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	150.001.000
					2. Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100%	
					3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100%	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100%	96.473.000



Rencana Aksi Kinerja (RAK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

			Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50	29.441.000
			Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30	18.589.500
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10	4.151.000
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.565.000
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	13.726.500
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	100%	53.528.000
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	2	20.512.000
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	69	33.016.000
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan				Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial	60 (B)	
		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	100%	5.399.386.067
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	48.138.700
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	48.138.700
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%	4.092.797.767
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	4.092.797.767
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	77.655.000
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	77.655.000



Rencana Aksi Kinerja (RAK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	320.819.900
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	2.747.300
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	111.142.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	7.993.500
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	11.642.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	19.638.100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	167.657.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	688.318.700
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	8.800.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	29.802.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	17.910.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	631.806.700
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	171.656.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	145.856.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	25.800.000
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	100%	28.893.500
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota.	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	100%	28.893.500
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman	3	



Kabupaten/Kota

Nasional Kabupaten/Kota

Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

28.893.500



2.3 RENCANA AKSI KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan 2025-2026 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Sosial yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran. Untuk merealisasikan tahapan perencanaan tiga tahunan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan telah menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi. Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini sebagai tonggak awal Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kinerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dari segi Target Capaian Kinerja dan Target Realisasi Anggaran di susun secara per triwulan sebagaimana yang tergambar dalam matriks berikut :



Tabel 2.6
Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Tahun 2026

SASARAN PEMDA	IK SASARAN PEMDA	SASARAN OPD	IK SASARAN	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	CAPAIAN PER TRIWULAN												
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Menurunnya kemiskinan (Misi 1, Sasaran ke-5)	Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%									557.195.000			25%			25%			25%				25%
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%					142.888.000			25%			25%			25%				25%
							2. Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	100%														100%				
							3. Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	70%									17.5%		17.5%			17.5%				17.5%
							4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergradiasi dari Kemiskinan	2%									0,50%		0,50%			0,50%				0,50%
									Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	100%	142.888.000			25%		25%			25%				25%	
									Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (PKH)	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		7714	55.196.000			7714		7714			7714				7714	
									Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat / UEP	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		20	12.800.000									20				
									Pemutakhiran data DTSEN melalui verifikasi dan validasi	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan		4	74.892.000			1		1				1				1
						Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%				166.078.000			25%		25%			25%					25%
							2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%								25%		25%			25%					25%
							3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%								25%		25%			25%					25%
							4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%								25%		25%			25%					25%
							5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%										33%			33%					34%
									Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	161.544.000			26%		39%			28%					7%
									Penyediaan permakanan, sandang, alat bantu untuk penyandang disabilitas	Jumlah orang yang dipenuhi kebutuhan dasar		90	73.614.000			25		25	20			20				
									Pemberian layanan reunifikasi, pendampingan, rujukan, penelusuran keluarga, layanan data/ aduan, fasilitas akses pelayanan pendidikan/kesehatan dasar, Fasilitas pembuatan dokumen kependudukan, pelatihan PSBR, pelatihan WJSC	Jumlah orang yang diberikan layanan		66	87.930.000		5	5	6	6	4	5	2	2	20	4	5	2
									Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	4.534.000					33%			33%				34%	
									koordinasi kerjasama pelayanan rehabilitasi sosial antara Dinas Seruyan dengan Panti Sosial di Palangkaraya dan Banjarmasin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		3	4.534.000					1			1				1	
					Program Penanganan Warga Negara	Meningkatnya layanan penanganan	Persentase warga Negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	Pemulangan Warga Negara Migran Korban	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debaraksi di	100%	3.823.000					50%								50%



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2026 ini merupakan komitmen Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sebagai upaya untuk menyelenggarakan yang bersih sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Selain itu Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan penjabaran dari sasaran instalansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang rencanakan.

Rencana Aksi Kinerja (RAK) merupakan suatu rumusan yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (Outcome). Sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan pada tahun 2026, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi tahunan dan berkala secara periodic (bulanan / triwulan / semester).

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) ini, diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada Tahun 2026.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Sosial,



HALIDAH, S.Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017